

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis biaya keluaran pada 4 kegiatan berikut, yaitu Pengelolaan LHKPN, Pengelolaan Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Pelaksanaan Kajian dan Pemantauan, serta Pengelolaan Antikorupsi Badan Usaha dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tahapan aktivitas pelaksanaan kegiatan di atas telah tersusun sesuai Tabel 4.1 tentang Tahapan Pelaksanaan Kegiatan. Dokumen proses bisnis kegiatan dimaksud telah menggambarkan tugas dan fungsi Unit Kerja berdasarkan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Proses bisnis pada kegiatan Pengelolaan Gratifikasi dan Anti Korupsi Badan Usaha belum sepenuhnya menggambarkan korelasi antar sub kegiatan sehingga berpotensi timbulnya perbedaan mekanisme kerja yang digunakan.
- b. Biaya keluaran telah dirumuskan sesuai Tabel 4.6 tentang Perhitungan *Unit Cost*. Sumberdaya pada keempat kegiatan di atas dikelompokkan dalam belanja barang non operasional, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa lainnya dan belanja perjalanan dinas dalam negeri. Diantara sumberdaya dimaksud yang memiliki nilai terbesar adalah biaya paket perjalanan dinas. Namun lokasi perjalanan dinas dalam negeri belum bisa ditentukan secara spesifik jadi masih berupa asumsi. Secara keseluruhan hasil perhitungan biaya dengan metode *ABC* diperoleh efisiensi *unit cost* mencapai 10% sehingga metode ini tepat untuk diterapkan.
- c. Ada 4 keluaran yang bisa digunakan sebagai SBK Khusus yaitu Pendaftaran LHKPN, Pemeriksaan LHKPN, Penetapan Status Gratifikasi dan Pelaksanaan Kajian. Hal ini bisa dilihat dari selisih yang relatif kecil antara perhitungan biaya metode *ABC* dengan realisasi pada tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa keluaran itu memiliki aktivitas yang cenderung tetap.

## B. Saran

Hasil penelitian di atas diharapkan bisa memberi manfaat dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien, karena itu kami menyarankan kepada Sekjen KPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk :

- a. Melengkapi dokumen proses bisnis hingga pada level aktivitas untuk semua kegiatan unit kerja di lingkungan KPK dan menggunakannya sebagai dasar dalam perencanaan penganggaran.
- b. Menggunakan metode *Activity Based Costing* untuk menghitung kebutuhan biaya kegiatan di lingkungan KPK berdasarkan rencana kerja dengan sasaran dan target yang lebih terukur. Paket perjalanan dinas sebagai sumberdaya terbesar harus dapat dikelola secara selektif dengan jumlah anggota tim yang terbatas.
- c. Menyampaikan usulan SBK Khusus kepada Kementerian Keuangan untuk 4 (empat) keluaran yaitu Pendaftaran LHKPN, Pemeriksaan LHKPN, Penetapan Status Gratifikasi dan Pelaksanaan Kajian agar bisa ditetapkan sebagai SBK Khusus di tahun 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Kamaroesid, Harry. (2013). *Sistem Administrasi Anggaran Negara*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Kencana Syafiie, Inu. (2017). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mulyadi. (2007). *Activity Based Costing System*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Radhiansyah, Emil, dkk. (2014). *Menuju Politik Anggaran berbasis Kinerja*. Jakarta : Paramadina Public Policy Institute
- Rahayu, Elly, dkk. (2021). *Analisis Proses Bisnis*. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Riadi, Edi. (2016). *Statistika Penelitian*. Yogyakarta : Andi
- Ritongan, Irwan. (2012). *Analisis Standar Belanja*. Yogyakarta : Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

### JURNAL

- Biswan, Alil Tafriji. (2021). *Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik*. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021
- Chea, Ashoford. (2011). *Jurnal : Activity based Costing System in The Service Sector: A Strategic Approach for Enhancing Managerial Decision making and Competitiveness*. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 11, November 2011
- El Haqqi, Arina Chimaya. (2018). *Perhitungan Biaya Pendidikan Menggunakan Metode Tradisional dan ABC di SMKN 1 Bantul*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XVI, No. 1, Tahun 2018

- Gunawijaya, Rahmat. (2017). *Evaluasi Kewajaran Anggaran Kegiatan melalui Analisis Standar Belanja Dengan Pendekatan Activity Based Costing di Institut Agama Islam Negeri Pontianak*. Jurnal Ekonomi Daerah, Vol. 5, No. 3, Tahun 2017
- Kajah, Nasikhatun. (2016). *Jurnal : Penerapan Metode ABC dalam Menentukan Tarif Jasa Rawat Inap (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum RA. KARTINI Kabupaten Jepara)*. Journal of Accounting, Vol. 2, No.2, Maret 2016
- Kariyoto. (2017). *Implementasi Value For Money, Input, Output, Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, Vol. 11, No. 1, Tahun 2017
- Kusuma, Said Iwan. (2019). *Pengaruh Standar Biaya Keluaran Terhadap Efisiensi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Badan Pemeriksa Keuangan)*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara, No. 1, Vol. 1, Tahun 2019
- Lestari, Niken Ajeng. (2017). *Memadukan Konsep SBKU Riset dengan Fleksibilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana*. Jurnal Sistem Penganggaran, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018
- Lestari, Niken Ajeng. (2018). *Hasil Monitoring dan Evaluasi Stndar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017*. Jurnal Sistem Penganggaran, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018
- Lista, Ade dan Miswaty. (2021). *Jurnal : Perlakuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan pada Balai Diklat Keuangan Balikpapan : Pendekatan ABC*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, Tahun 2021
- Nur Afiah, Nunuy. (2010). *Prospek Kelayakan Penentuan Cost of Services and Charging of Services di Sektor Publik Dengan Menggunakan Activity Based Costing*. Jurnal Akuntansi, Vol. XIV, No. 1, Tahun 2010
- Prastowo, Nono. (2014). *Jurnal : Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Jejaring Administrasi Publik. Tahun VI, No. 2, Juli - Desember 2014
- Walidi. (2017). *Kajian Pengelolaan Biaya Dalam Sistem Penganggaran*. Jurnal Sistem Penganggaran, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018

## **REGULASI**

- Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L)

Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan No. 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan No. 232 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan No. 123 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020

Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK

Peraturan Pimpinan KPK No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Proses Bisnis, Prosedur Operasional Baku dan Instruksi Kerja Pada KPK

Peraturan Pimpinan KPK No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas KPK.

Peraturan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan No. 4 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Tahun 2020

Undang - Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara